

**ANALISIS *SADDU ADH-DHARĪ'AH* TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMERINTAH TENTANG ATURAN MENGHADIRI  
UNDANGAN WALĪMAH PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI  
COVID-19**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Rohmat Efendy**

**NIM. C01216042**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rohmat Efendy  
NIM : C01216042  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /  
Hukum Keluarga Islam  
JudulSkripsi : Analisis *Saddu Adh-Dhari'ah* Terhadap Kebijakan  
Pemerintah Tentang Menghadiri Undangan  
Walimah Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2020

Saya yang menyatakan



Rohmat Efendy  
NIM. C01216042

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Rohmat Efendy NIM. C01216042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Desember 2020  
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zayin', with a large, stylized initial 'Z'.

Drs. H. M Zayin Chudlori, M.Ag.  
NIP. 195612201982031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rohmat Efendy NIM. C01216042 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 04Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Drs. H.M. Zayin Chudluri, M.Ag  
NIP.195612201982031003

Penguji II,

Dr.Hj. Suqiyah Musafaah, M.Ag  
NIP.196303271999032001

Penguji III,

Suyikno, S.Ag, MH.  
NIP.197307052011011001

Penguji IV,

Elly Uzlifatul Jannah, MH.  
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 04Februari 2021

Mengesahkan.

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rohmat Efendy  
NIM : C01216042  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : rofend22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain  
(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS *SADDU ADH-DHARI'AH* TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMERINTAH TENTANG ATURAN MENGHADIRI UNDANGAN  
WALĪMAH PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober  
2021

(Rohmat Efendy)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Saddu Adh-Dhari’ah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri Undangan Walimah Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang; bagaimana kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan dimasa pandemi Covid-19, dan bagaimana analisis *Saddu Adh-Dhari’ah* terhadap kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pola pikir deduktif. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan metode literature atau kepustakaan dan dengan teknik deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan secara jelas dan mendalam tentang analisis *Saddu Adh-Dharī'* terhadap kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan dimasa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian dari kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan dimasa pandemi Covid-19 adalah diperbolehkan menghadiri undangan walimah pernikahan dengan syarat kondisi epidemiologis di daerah atau wilayah dengan kategori zona aman dan dengan design protokol kesehatan. Namun bagi zona dengan kondisi yang belum aman, oleh pemerintah daerah melarang untuk menghadiri walimah pernikahan. Dan berdasarkan analisis *Saddu Adh-Dharī'ah* tidak menghadiri undangan walimah pernikahan dimasa pandemi Covid-19 ini lebih diutamakan, karena meskipun dalam kondisi zona aman tidak menjamin akan tidak tertularnya dari penyebaran penyakit virus Covid-19.

Menyarankan kepada para tamu undangan untuk tidak memaksakan hadir apabila dalam memenuhi undangan dapat melalui alternatif online. Atau walaupun tetap memaksakan diri untuk hadir, maka sebaiknya mengecek kesehatan diri terlebih dahulu agar dalam memenuhi undangan walimah pernikahan tetap dalam kondisi kuat dan sehat serta aman dari Covid-19. Terlebih tidak merepotkan pemerintah, melainkan akan membantu menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	10
G. Definisi Operasional .....	11
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II WALĪMAH PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM .....	18
A. Walīmah Pernikahan .....	18
B. Saddu Adh-Dharī’ah .....	31
BAB III KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ATURAN MENGHADIRI UNDANGAN WALĪMAH PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19.....	41
A. Sekilas Tentang Covid-19 .....	41
B. Kebijakan Pemerintah .....	42
C. Menghadiri Walīmah Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 .....	57





## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna.<sup>1</sup> Dimana dalam setiap ajarannya mencakup segala sisi dalam kehidupan, baik itu yang berhubungan dengan Allah swt maupun yang berhubungan dengan sesama makhluk ciptakan-Nya. Seperti halnya hubungan makhluk yang bernama manusia dengan sesama manusia itu sendiri yang disebut hablum minannas.

Dalam sebuah hubungan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, agar hubungan itu dapat menjadi baik perlu adanya sikap yang baik pula. Mengingat untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup seseorang sangat bergantung kepada orang lain. Contoh sederhana seperti seseorang yang ingin menutup tubuhnya dengan busana atau pakaian yang di buat oleh orang lain.

Dengan hal tersebut kebutuhan terhadap orang lain menjadi sangat penting, sebagaimana makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dari bantuan orang lain. Maka dari itu, Islam hadir sebagai tuntunan atau ajaran yang di syari'atkan, salah satunya dengan adanya sebuah pernikahan sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

1

Dari adanya sebuah pasangan yaitu istri yang melalui sebuah pernikahan, hubungan sesama manusia menjadi saling menjaga, saling membantu, saling memenuhi kebutuhan orang lain. Dan hubungan cenderung merasa tentram akibat dari kasih sayang sebuah pernikahan.

Sebuah pernikahan tidak hanya menyangkut kepentingan dua orang suami istri yang bersifat rahasia, akan tetapi pernikahan melibatkan kedua orang tua dari keluarga pria maupun keluarga wanita, bahkan handai tolan dan masyarakat umum dalam bentuk resepsi (walimah) sebagai bentuk pembuktian bahwa pernikahan itu telah terjadi. Selain itu, resepsi pernikahan (walimah) juga sebagai sarana saling mengenal dan saling setuju antara masing-masing keluarga pria maupun keluarga

2

Sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan masyarakat umum, perlu adanya acara walimah atau resepsi pernikahan untuk memberi kabar kepada halayak umum. Menurut Sudarsono, perlu adanya suatu walimah dalam sebuah pernikahan, yaitu perayaan atau perhelatan yang menyertai adanya pernikahan ketika terjadinya akad nikah antara kedua mempelai dengan masyarakat, sebab dengan prinsip pokok pernikahan Islam yang harus diketahui oleh masyarakat umum sebagai tanda diresmikannya suatu pernikahan.<sup>3</sup> Dengan adanya walimah atau resepsi pernikahan, sebuah pernikahan mempunyai nilai kemaslahatan karena memang selain tidak memunculkan pandangan buruk terhadap masyarakat, namun juga sebagai bentuk rasa syukur dengan berbagi kebahagiaan memberikan hidangan makanan kepada yang tidak mampu maupun yang sudah mampu. Jadi meskipun tanpa adanya resepsi pernikahan sudah sah menurut hukum, namun juga perlu adanya pelegalan menurut pandangan masyarakat umum.

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا (رواه البخري).

3



Pandemi Covid-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Virus penyakit ini dikenal pada mulanya wabah di Kota Wuhan Tiongkok. Dalam perkembangannya, virus ini semakin cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia yang disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Mulai dari melalui hewan ke manusia, atau melalui udara atau melalui kontak langsung antar manusia itu sendiri.

Virus ini dapat menular lebih cepat apabila seseorang saling berdekatan, meskipun bergerombol atau berkumpul dalam satu tempat dengan jumlah banyak. Sehingga dalam himbauan pemerintah, masyarakat dilarang keluar rumah. Selain itu, juga dilakukan di rumah seperti pembatasan yang dilakukan

Virus ini dapat menular lebih cepat apabila seseorang saling berdekatan ataupun bergerombol atau berkumpul dalam satu tempat dengan jumlah banyak. Sehingga dalam himbauan pemerintah, masyarakat dilarang keluar rumah. Aktivitas juga dilakukan di rumah seperti pembatasan yang dilakukan pada liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan moda transportasi, pembatasan kegiatan keagamaan dan fasilitas umum, pembatasan kegiatan lainnya.<sup>9</sup> Dari beberapa pembatasan tersebut yang sudah berjalan beberapa bulan dalam rangka mengurangi penyebaran virus, ternyata berdampak kepada perekonomian masyarakat dan berpengaruh pada kas negara. Sehingga dari berbagai

<sup>9</sup>Permenkes 9 Tahun 2020, Pasal 13.

pertimbangan, pemerintah mengambil keputusan untuk mampu beradaptasi perilaku bersih dengan kenormalan baru yang disebut *new normal*.<sup>10</sup>

Dengan adanya aturan *new normal* ini, beberapa pernikahan di sejumlah tempat berani mengadakan acara resepsi pernikahan dengan konsep sedemikian rupa aturan *new normal*. Tentunya mengundang beberapa kelompok masyarakat dalam jumlah yang tidak sedikit, dimana dalam pandangan Islam menghadiri undangan adalah berhukum wajib. Akan tetapi di sisi lain harus menghindari sebuah kemudharatan berupa virus Covid-19 serta akibat penyebarannya.

Dengan beberapa pemaparan di atas, penulis menemukan sebuah permasalahan yang akan penulis teliti, dan penulis lebih fokus mengkaji tentang bagaimana hukum menghadiri undangan resepsi pernikahan di masa pandemi Covid19. Dengan demikian penulis mengambil judul *Analisis Saddu Adh-Dharī'ah Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri Undangan Walīmah pernikahan di Masa Pandemi Covid-19.*

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

## 1. Identifikasi Masalah

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19 yang di analisis menggunakan *saddu Adh-dharīah*. Dengan

<sup>10</sup>Muhammad Nuramdani, “New normal: Definisi, Panduan, Penerapan Saat Pandemi COVID-19”, dalam <https://doktersehat.com/new-normal-pandemi-covid-19/>, diakses pada 28 Mei 2020.

- a. Hukum Islam terhadap walimah dan kedudukan menghadirinya
- b. Kebijakan pemerintah tentang aturan berkumpul terkait adanya pandemi Covid-19.
- c. Walimah pernikahan di era *new normal*.
- d. Analisis *Saddu Adh-Dhari'ah* terhadap kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Dari beberapa identifikasi tersebut, penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut ini:

- a. Kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.
- b. Analisis *Saddu Adh-Dharī'ah* terhadap kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

1. Bagaimana kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19?







Kedua, skripsi yang berjudul “*Menghadiri Walimah Pernikahan Married By Accident (MBA) Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi do Desa Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Cilacap)*”. Dalam skripsi tulisan Nur Choerouningsih ini dibahas menurut pandangan hukum Islam terhadap menghadiri walimah pernikahan, dimanapernikahan yang terjadi adalah akibat dari zina. Karena yang terjadi adalah masyarakat Desa Sampang tetap menghadiri acara walimah tersebut, dimana dalam hal ini terdapat indikasi aturan bila ditinjau dari hukum Islam. Namun menurut jumhur ulama’ tidak melarang untuk menghadirinya, dikarenakan perkara zina dan walimah nikah adalah perkara yang berbeda. Yang mana perkara zina itu terjadi sebelum adanya akad nikah sedangkan walimah nikah merupakan perbuatan yang mulia, sehingga untuk menghadiri undangan walimah nya tetap wajibkan.<sup>12</sup> Sedangkan kewajiban menghadiri acara walimah pernikahan yang penulis teliti berhubungan langsung dengan adanya Covid-19 dalam acara walimah.

Deli Serdang (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, (Skripsi-UIN Sumatera Utara, 2018).

9

walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

memberikan penjelasan analisis *Saddu Adh-Dharī'ah* terhadap kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

**Penelitian**

Teoritis

cara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan terutama bagi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keislaman tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

## F. KegunaanHasilPenelitian

- ## 1. Kegunaan Teoritis

Secara praktis, masyarakat tentunya dapat memperoleh manfaat berupa pengetahuan tentang kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19, sehingga

masyarakat mengetahui dengan benar hukum berkumpul dan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

## G. Definisi Operasional

Pada bagian ini berisikan penjelasan tentang pengertian singkat yang bersifat operasional dan bukan kata perkata sehingga dapat dijadikan acuan untuk memahami variabel dalam penelitian ini.<sup>13</sup> Sesuai dengan judul skripsi “Analisis *Saddu Adh-Dharī’ah* Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Aturan Menghadiri Undangan Walimah Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19”, untuk memudahkan pembahasan dalam memahami dan menghindari adanya kesalahfahaman ataupun kesalahtafsiran, dengan ini penulis memberikan pengertian singkat mengenai istilah berikut:

Analisis *Saddu Adh-Dharī'ah* merupakan proses memecahkan suatu masalah berdasarkan kaidah ushul dalam fiqh sebagai salah satu istinbat hukum atau untuk menetapkan sebuah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadīth. Dimana dalam pengertiannya sendiri *Saddu Adh-Dharī'ah* adalah menutup jalan kepada kerusakan dengan tujuan mendapat kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.<sup>14</sup>

Walimah Perkawinan adalah pertemuan atau perjamuan resmi yang diadakan untuk menerima tamu<sup>15</sup> atau suatu perhelatan yang diadakan dengan

<sup>13</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2018), hal 8-9.

<sup>14</sup>Masykur Anshori, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116

15KBBI

tujuan menginformasikan atau maklumat dengan jamuan yang telah disediakan oleh tuan rumah yang berhajat.

Pandemi Covid-19 merupakan peristiwa Dunia terkait menyebarnya penyakit virus atau disebut *coronavirus disease 2019* atau disingkat dengan istilah Covid-19 ini yang berasal dari kota wuhan China. Covid-19 ini disebabkan oleh koronavirus dengan resiko yang mengakibatkan virus ini yaitu akan mengalami gejala-gejala ringan bahkan sedang.

## H. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu untuk dipergunakan dalam sebuah penelitian. Adapun metode penelitian yang akan di pergunakan dalam penelitian ini memuat uraian tentang:

### 1. Data yang dikumpulkan

Yaitu data-data yang dihimpun sebagai bahan untuk menjawab dari rumusan masalah. Data tersebut yaitu:

- a. Data tentang kebijakan pemerintah terkait aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid19.
- b. Data tentang menghadiri undangan walimah pernikahan dalam Islam.
- c. Data yang di peroleh dari buku, kitab-kitab hukum Islam, artikel, jurnal, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, digunakan beberapa sumber tertulis maupun tindakan yang akan digunakan sebagai bahan materi dan rujukan dalam pembahasan. Sumber data ini meliputi:

a. Data Primer.

Data primer yaitu data-data yang menjadi bahan pokok acuan sebuah penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*, maka yang menjadi sumber primer dalam objek penelitian ini adalah Kepmendagri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru dan kewajiban menghadiri undangan walimah dalam Islam.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data literatur yuridis normatif untuk memperkuat dan melengkapi dari sumber primer, data skunder tersebut diantaranya:

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



11) Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19,

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah metode pengumpulan data ini dilakukan meliputi hal berikut:

<sup>16</sup>Sartono Kartodirjo, *Metodologi Penggunaan Bahan Dokumen dalam Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hal 47.

Teknik Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menganalisa data-data tersebut. Analisis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan secara jelas dan mendalam tentang analisis hukum Islam terhadap kebijakan pemerintah tentang larangan menghadiri undangan walimah pernikahan di era *new normal*. Metode skripsi ini dengan menggambarkan secara rinci tentang ketentuan peraturan pemerintah tentang pencegahan virus Covid-19 terhadap walimah pernikahan dan di analisa keefektifitasnya. Kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang kewajiban menghadiri undangan walimah pernikahan di era *new normal* dengan mencari sumber dari kitab-kitab kajian Islam dan di padukan dengan hasil pengumpulan buku atau literatur yang terdapat dalam sumber sekunder, sehingga bisa ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari beberapa Bab dan sub Bab yang secara rinci akan dijelaskan di bawah ini.



Bab II, yaitu menjelaskan landasan teori tentang dasar hukum mengadakan walimah pernikahan dan kedudukan menghadirinya berdasarkan hukum Islam. Kemudian penjelasan hukum Islam *Saddu Adh-dharī'ah*.

Bab III, dalam Bab ini akan dijelaskan tentang gambaran bentuk walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana prosedur menghadiri walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Bab IV, yaitu Bab inti, yang berisi penjelasan tentang analisis *Saddu Adh-dharī'ah* terhadap kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Bab V, adalah Bab penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang terdapat di Bab I. Kemudian saran peneliti terhadap penelitian.

Bab III, dalam Bab ini akan dijelaskan tentang gambaran bentuk walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana prosedur menghadiri walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Bab IV, yaitu Bab inti, yang berisi penjelasan tentang analisis *Saddu Adh-Dharī'ah* terhadap kebijakan pemerintah tentang aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19.

Bab V, adalah Bab penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang terdapat di Bab I. Kemudian saran peneliti terhadap dari hasil penelitian.

# WALĪMAH PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM

## 1. Pengertian Walīmah Pernikahan.

Walimah sendiri artinya adalah pertemuan atau perjamuan formal yang diperuntukkan untuk menerima tamu, baik dalam sebuah pernikahan ataupun dalam sebuah acara pertemuan lainnya.<sup>18</sup> Dalam kitab al-Umm, Imam Syafii juga mengatakan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan dalam perayaan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa yang membahagiakan

<sup>18</sup>DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 745

Kemudian makna Walimah pernikahan dalam literatur Arab adalah walimah (الوليمة) yang berarti *al-jam'u* yaitu kumpul, atau sebab dari berkumpulnya suami istri, atau sebab dari berkumpulnya handai tolan yakni; saudara, sanak keluarga, dan para tetangga.<sup>21</sup> Walimah juga berarati (الوليم) yang bermakna makanan pengantin, dalam hal ini adalah makanan yang di suguhkan khusus dalam acara pesta pernikahan. Atau dapat di artikan sebagai makanan untuk tamu undangan pengantin.<sup>22</sup> Beberapa ulama menggunakan kata walimah sebagai ungkapan pada setiap jamuan makan, atau sebagai kesempatan ketika mendapat kesenangan. Namun lebih banyak digunakan di setiap kesempatan perkawinan.<sup>23</sup> Sedangkan secara istilah, walimah adalah makanan yang di suguhkan secara khusus dalam acara perkawinan.<sup>24</sup>



Dari beberapa pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa walimah merupakan upacara perhelatan jamuan makanan yang dilakukan pada waktu akad, setelah akad atau sebelum dan sesudah malam pertama. Dengan tujuan memberikan kabar kepada halayak umum atas telah terjadinya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas kebahagiaan yang didapat oleh kedua mempelai.

Islam dalam syari'atnya telah menyariatkan adanya pesta pernikahan demi tujuan-tujuan yang mulia. Tujuan terpenting antara lain; menemani dan menggembirakan seorang Muslim pada hari kegembiraan pernikahannya, menyaksikan pernikahan bersama masyarakat sekitar pada malam pernikahan, memperteguh tali kasih sayang diantara kerabat, teman dan anak-anak dalam kesempatan-kesempatan yang paling membahagiakan. Hal tersebut mempunyai makna dan pengaruh yang amat di anjurkan oleh Allah dan direalisasikan, agar persatuan sosial dan hubungan persaudaraan menjadi lebih kuat.

<sup>30</sup>Al-Syairazi, *al-Muhazzab*, juz II, (Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah, 393-476H), 477.

<sup>31</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet III, (Jakarta: Kencana, 2006), 156

Perayaan pengantin ini dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur atas telah terjadinya pelangsungan akad nikah, dengan mengajak sanak keluarga dan saudara beserta masyarakat umum untuk makan-makan bersama merasakan kebahagiaan setelah menyaksikan peresmian pernikahan tersebut. Walimah nikah dilaksanakan ketika setelah terjadinya akad nikah di hari perkawinan (malam pertama) atau dikeesokan harinya atau ada juga yang ketika berlangsungnya akad nikah, dan tergantung kebiasaan adat masing-masing daerah yang berlaku.<sup>32</sup> Islam menganjurkan agar pelaksanaan walimah dilakukan setelah akad nikah berlangsung, sebagai rasa syukur atas kebahagiaan yang dirasakan kedua mempelai dan keluarganya.<sup>33</sup> Dengan diadakannya setelah akad nikah berlangsung, keluarga beserta masyarakat dan tamu undangan dapat menyaksikan secara langsung dan ikut mengamini atas doa kedua mempelai.

<sup>32</sup>Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 149

<sup>33</sup>Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: Adipura, 1999) 113.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْفَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْفَمَ عَلَى زَيْنَبٍ أَوْفَمَ بِشَاةٍ. (رواه البخارى)

Artinya; “Dari Anas ra berkata, “Belum pernah aku meihat Rasulullah SAW. Merayakan pernikahannya dengan salah satu istrinya seperti perayaan (walimah) Zaynab. Beliau menyembelih seekor kambing.” (H.R. al-Bukhori dan Muslim).

Apabila belum mampu, maka walimah dapat berupa makanan ringan, meski tidak terdapat daging. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh shohih Bukhari No. 4762 yaitu:

Artinya; “Dari Anas ra berkata, “Belum pernah aku meihat Rasulullah SAW. Merayakan pernikahannya dengan salah satu istrinya seperti perayaan (walimah) Zaynab. Beliau menyembelih seekor kambing.” (H.R. al-Bukhori dan Muslim).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَحْبَبَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةٍ بِنْتُ حُجَيْمٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِمْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمْرًا بِالْأَنْطَاعِ فَأُلْقِيَ فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَفِطْوَالِ السَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتُهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ احْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَبَبَهَا فِيهِ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجِبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ازْتَحَلَ وَطَى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ . (رواه بخاری)

23

















juga yang menganggap *Maqōsidu* adalah *maslahah* itu sendiri. Ada juga yang memahami *Maqōsidu* adalah prinsip Islam yang berasaskan lima penjagaan yaitu; menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga agama, dan menjaga harta, sehingga dapat disimpulkan *Maqōsidu Al-Syarī'ah* adalah matlummat-matlummat yang ingin dicapai oleh *syarī'at* demi kepentingan umat manusia. Dengan begitu, terkait dengan walimah dalam pandangan hukum Islam memiliki tiga tujuan, diantaranya adalah:

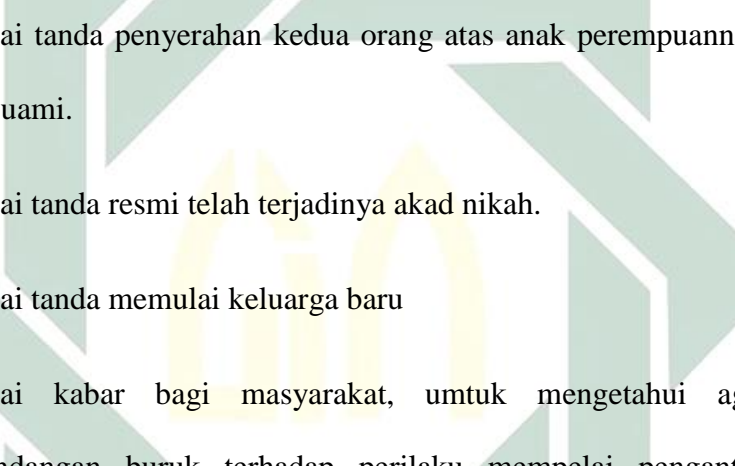
a. Pemberitahuan

b. Ajang mendo'akan

c. Ungkapan rasa syukur

## 5. Hikmah Walīmah

Adapun dari beberapa tujuan diadakannya walimah, tentunya pelaksanaan walimah memiliki hikmah yang didapat bagi tuan rumah maupun dari khalayak umum yang ikut merasakan kebahagiaannya, hikmah itu di antaranya:

- 
- a. Rasa syukur kepada Tuhan. .
  - b. Sebagai tanda penyerahan kedua orang atas anak perempuannya kepada sang suami.
  - c. Sebagai tanda resmi telah terjadinya akad nikah.
  - d. Sebagai tanda memulai keluarga baru
  - e. Sebagai kabar bagi masyarakat, untuk mengetahui agar tidak berpandangan buruk terhadap perilaku mempelai pengantin dalam kehidupan sehari-hari.

### B. Saddu Adh-Dharī'ah

### 1. Pengertian *Saddu Adh-Dharī'ah*

*Saddu Adh-Dharī'ah* dalam segi bahasa berasal dari kata (سد الذريعة) yang terdiri dari dua kata yaitu (سد) yang berarti menutup dan (الذريعة) yang berarti wasilah atau jalan kepada suatu tujuan. Maka kalau digabung (سد الذريعة) berarti



Namun pendapat tersebut, oleh beberapa ulama' ushul lainnya menentang pendapat itu. Adapun alasan menentang diantaranya yaitu dari Ibnu Qayyim Aj-Jawziyyah menyatakan bahwa *Adh-Dhari'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, namun ada juga yang di anjurkan, dan lebih tepat kalau *Adh-Dhari'ah* itu dibagi dua, yaitu *Adh-Dhari'ah* yang dilarang dan yang dianjurkan.<sup>50</sup>

التوسل بما هو مصلحة الى مفسدة

Dengan pengertian tersebut bahwa *Saddu Adh-Dhari'ah* adalah  
 atan yang dilakukan oleh seseorang yang semula mengandung  
 lahatan dan berakhir menjadi kerusakan. Seperti seseorang yang telah  
 bkan membayar zakat, akan tetapi sebelum genap setahun seseorang

<sup>51</sup>Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2012), hal. 156.



Menurut Ash-Shawkani dalam Nasrun Rusli mendefinisikan *Adh-Dharī'ah* dengan melihat segala sesuatu secara lahir adalah boleh, namun sesuatu tersebut membawa kepada perbuatan yang dilarang. Definisi ini ternyata mirip dengan definisi yang dirumuskan Ash-Shātibī dalam Nasrun Rusli, definisi tersebut yaitu: “segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung kerusakan”, sehingga hasil definisi itu memunculkan istilah *Saddu Adh-Dharī'ah* yang artinya menutup jalan kepada kejahatan.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Hukum *Saddu Adh-Dharī'ah*

<sup>54</sup>Syafiudin Shiddiq, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104.





Hadīth tersebut telah memperlihatkan bahwa *Saddu Adh-Dharī'ah* merupakan salah satu alasan sebagai metode dalam menetapkan hukum 'akibat', sebab dalam Hadīth ini Rasulullah SAW masih bersifat menduga akibat yang dilakukan seseorang yang melaknat, namun dari dugaan tersebut Rasulullah SAW melarangnya.<sup>60</sup>

مَا آدَى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

دَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Dari kaidah diatas menunjukkan bahwa segala perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf adalah dilarang hukum syara' seperti zina, pencurian, dan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan sendiri, dan ada juga yang perbuatan tersebut sebagai perantara untuk berbuat kerusakan seperti berkhawat yang mengarah terjadinya perbuatan zina dll.<sup>63</sup>

<sup>63</sup> Ash-Shiddiegy, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 166.





c. Kemudian segala suatu yang tadinya diperbolehkan namun tidak secara sengaja menimbulkan suatu keburukan. Dan keburukan ini pada umumnya tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Bahkan bisa jadi keburukan lebih besar didapatnya daripada kebaikan. Contohnya memaki sesembahan orang-orang musyrik.

d. Dan segala sesuatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi terkadang malah menjadi suatu keburukan. Namun kebaikan lebih besar akibatnya daripada keburukan. Contohnya melihat perempuan yang sedang dilamar dan mengkritik pemimpin alim.

- a. Sesuatu yang asalnya tidak dilarang namun bisa jadi menjadi sarana perbuatan yang dilarang. Misalnya menanam anggur yang bisa jadi dijadikan minuman khamr.
- b. Sesuatu yang disepakati dilarang, misalnya memaki sesembahan agama lain yang diduga sesembahan tersebut akan membalas memaki Allah

39





**KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ATURAN MENGHADIRI  
UNDANGAN WALĪMAH PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Pada 30 Januari 2020 WHO telah menyatakan bahwa Dunia masuk dalam darurat kesehatan global karena virus Corona ini. Dimana Dunia dikagetkan dengan menyebarnya Covid-19 yang hampir tersebar di seluruh Dunia. Hal ini merupakan kejadian yang luar biasa terjadi pada abad ini, dengan skala sama dengan perang Dunia II, kerana berbagai event di belahan Dunia hampir seluruhnya dibatalkan.

<sup>67</sup>Centers for Disease Control and Prevention, “How It Spreads”, dalam [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC\\_AA\\_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html), diakses pada 17 Maret 2020.

Penyebaran virus ini melalui kontak dekat berupa tetesan pernapasan ketika orang bersin atau batuk. Virus ini biasanya tidak mengudara, namun mengendap di permukaan benda selama 72 jam, hingga orang-orang menyentuh permukaan yang terkontaminasi Covid-19 kemudian menyentuh wajah mereka dan masuk dalam tubuh. Virus ini gampang menular pada orang yang bergejala, walaupun mungkin tertularnya sebelum gejala muncul. waktu gejala itu muncul umumnya antara dua sampai empat belas hari, dan rata-rata hari kelimanya.

Cara pencegahan dari tertularnya Covid-19 adalah dengan sering mencuci tangan, menjaga jarak fisik dari yang lain, khususnya bagi mereka yang memiliki gejala agar menutupi ketika bersin atau batuk dengan siku bagian dalam atau tisu, kemudian menjaga tangan agar menjauh dan tidak menyentuh wajah. Langkah selanjutnya dengan memakai masker sebagai cara efektif untuk mencurigai mereka apabila memiliki virus, atau dengan topeng kain berlapis yang berbahan tebal.

Dalam perkembangannya penanganan kasus Covid-19 paling buruk adalah kasus di Negara Italia sebab berminggu-minggu belum ada tindakan sama sekali untuk menahan pandemi di Negara tersebut. Sehingga angka kematian yang

42

yan yang lebih siapsiaga mengambil langkah lebih.<sup>70</sup> Langkah tersebut seperti lakukan *social distancing*, memperbanyak jumlah rapid tes, melacak orang yang datang dari Wuhan China dengan cepat setelah ada pengumuman dari Negara China tentang kemunculan virus jenis pneumonia yang berasal dari Wuhan. Dan langkah ini menjadi pembeda dengan Negara-negara barat lainnya, karena minggu-minggu belum ada tindakan nyata terkait wabah ini.

<sup>69</sup> Rossella Porcheddu et al, R., “Similarity in Case Fatality Rates (CFR) of Covid 19/ SARS-COV-2 in Italy and China”, *The Journal of Infection in Developing Countries*, Vol. 14. No. 2 (29 Februari, 2020), 125-128.

<sup>71</sup>Eunha Shim et al, “Transmission Potential and Severity of Covid 19 in South Korea”, *International Journal of Infectious Diseases*. Vol 93. No.. (April 2020), 339-344.



Namun setelah semakin banyaknya kasus positif covid-19, maka beberapa kebijakan pemerintah mulai diperbarui, yaitu:

- a. Mengadakan alat pelindung diri (APD) gratis bagi rumah sakit rujukan Covid-19.
- b. Membeli alat tes Covid-19.
- c. Menghimbau masyarakat untuk tidak keluar daerah.
- d. Menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing, physical distancing, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, serta kampanye slogan “dirumah saja”.
- e. Membuat kebijakan meliburkan sekolah dan universitas, serta kebijakan bekerja dari rumah.
- f. Melakukan rapid tes covid 19, menyemprot desinfektan di tempat umum.
- g. Memeriksa kesehatan masyarakat yang melakukan perjalanan luar daerah bahkan melakukan isolasi.
- h. Mengambil berbagai kebijakan ekonomi untuk tetap mempertahankan daya beli masyarakat.
- i. Menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dengan langkah tersebut agar masyarakat menjaga jarak selama 14 hari. Menjaga jarak fisik minimal dua meter ketika berinteraksi dengan orang lain serta menghindari adanya kerumunan atau bergerombol dalam keramaian guna

Langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah yaitu meliburkan universitas, serta para pekerja untuk menggantinya dengan belajar dari rumah, dan beribadah juga di rumah. Meskipun kegiatan tersebut sebagai sebuah kebebasan tanpa batas. Anjuran dari pemerintah agar penyebaran virus ini terhenti dikarenakan covid-19 kecil atau lewat percikan dari batuk maupun bersin seperti pernafasan.<sup>75</sup> Sehingga kemudian pemerintah menganjurkan rakyat untuk memakai masker terutama yang sakit. Dengan harapan dapat terbantu dan jumlah kasus yang terkena positif Covid-19 membanjiri layanan kesehatan.

Namun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut

il. Pada kenyataanya, masih banyak masyarakat yang tidak

n atau himbauan pemerintah. Disamping itu, pemerintah

---

NN Indonesia, “*Mengenal Social Distancing sebagai caramencegah*”  
[www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-gaya-hidup-sebagai-cara-mencegah-corona](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-gaya-hidup-sebagai-cara-mencegah-corona), pada 14 Maret 2020.

s for Disease Control and Prevention, “How It Spread”  
[www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC\\_AA\\_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fprepare%2Ftransmission.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fprepare%2Ftransmission.html), diakses pada 17 Maret 2020

46

CNN Indonesia, “*Mengenal Social Distancing sebagai cara mencegah*” [www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-g-sebagai-cara-mencegah-corona](http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200314102823-255-483358/mengenal-g-sebagai-cara-mencegah-corona), pada 14 Maret 2020.

World Health Organization, “How It Spreads,” [www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC\\_AA\\_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fprepare%2Ftransmission.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Fprepare%2Ftransmission.html), diakses pada 17 Maret 2020

46

<sup>75</sup>Centers for Disease Control and Prevention, “How It Spreads”, dalam [https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC\\_AA\\_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Ftransmission.html), diakses pada 17 Maret 2020

46

Indonesia adalah salah satu negara yang belum menerapkan karantina nasional. Salah satu sebab dari alasan itu karena Indonesia masih memperhentikan masalah ketahanan ekonomian yang harus difikirkan secara matang. Cara pemerintah menyikapi situasi ini adalah dengan mengambil kebijakan yang dianggap mampu menstabilkan perekonomian. Sehingga kebijakan yang sesuai dengan rasionalitas Negara adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).<sup>77</sup> Yang kemudian dibuat secara bersamaan dikeluarkannya KePres mengenai status darurat kesehatan. Dan aturan ini menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dan mulai pelaksanaannya diberlakukan pada tanggal 10 April di Jakarta, yang kemudian diikuti Kota lainnya.

<sup>76</sup>Heru Margianto, “Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifitas Lawan Corona”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/11054741/pembatasan-sosial-berskala-besar-efektifkah-lawan-corona> , pada 1 April 2020.

<sup>77</sup>Kemenkeu RI, “Pembatasan Sosial Berskala Besar dipilih Presiden untuk Cegah Meluasnya Pandemi Covid-19”, dalam <http://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembatasan-sosial-berskala-besar-dipilih-presiden-untuk-cegah-meluasnya-pandemi-covid-19/>, pada 31 Maret 2020.



listrik 900 VA bersubsidi selama 3 bulan. Kemudian setiap rumah bersubsidi yang berpenghasilan rendah dan pokok logistic lainnya.<sup>78</sup>

Setelah itu, wabah Covid-19 ini tak kunjung selesai. Akibatnya dan tentunya masyarakat semakin resah. Covid-19 ini, karena selain mengancam kesehatan jiwa dan hidup manusia. Untuk itu, wabah ini sebagai tantangan untuk perbaikan mendalam terkait aturan teknis yang ada. Karena harus diakui bahwa adanya wabah Covid-19 merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk menunjukkan eksistensi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebijakan yang efektifitasnya dan ketaatan masyarakatnya. Sehingga

id-19 ini, karena selain mengancam kesehatan j  
gan hidup manusia. Untuk itu, wabah ini sebagai  
ntuk perbaikan mendalam terkait aturan teknis yan  
sa. Karena harus diakui bahwa adanya wabah Covid  
ntangan bagi Pemerintah untuk menunjukkan eks  
natan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kebij  
efektivitasnya dan ketaatan masyarakatnya. Sehin

dari koordinasi sampai kerancuan komunikasi se

<sup>78</sup>Kemensetneg RI, “Jaring Pengaman Sosial disiapkan Pemerintah untuk Atasi Dampak Covid-19”, dalam <https://www.setneg.go.id/baca/index/jaring-pengaman-sosial-disiapkan-pemerintah-untuk-atasi-dampak-covid-19>, pada 19 April 2020.



Sedangkan disisi masyarakat, tingkahlaku setiap individu sangat mempengaruhi tingkat penyebaran covid 19. Dan solusi untuk mengendalikan baran itu adalah dengan mengisolasi diri didalam rumah, berkomunikasi n pihak medis melalui jarak, terkecuali memiliki gejala yang parah, dan uhi aktivitas yang bersifat pertemuan massal. Namun pada kenyataannya arakat Indonesia menunjukkan semakin banyak yang terjangkit kasus Covid-i. Masyarakat malah memilih untuk tidak takut dengan berlibur, dan ukan kegiatan secara berkerumun yang bertolak belakang dengan himbuan intah.

<sup>79</sup>Yudhi Hertanto, “Inkonsistensi ditengah Pandemi”, dalam <https://rmol.id/read/2020/04/05/428881/inkonsistensi-di-tengah-pandemi>, pada 5 April 2020.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata bahwa pekerja informal berjumlah 74.093.224 dan yang pekerja formal 55.272.968 orang. Dari data tersebut jumlah pekerja informal ini lebih banyak dan lebih rentan dalam sosialnya, sebab tidak dipungkiri bahwa mereka dihadapkan pada pilihan untuk mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga atau hanya mematuhi himbauan pemerintah. Contoh dalam hal ini, dalam mematuhi kebijakan *physical distancing* pemerintah untuk “dirumah aja” dengan nalar rasional mampu menyembuhkan penyebaran pandemic Covid-19. Namun nalar Pemerintah ini hanya mampu kepada *influencer*, artis dan kalangan menengah keatas. Secara mereka lebih mampu dan tidak begitu bergantung dengan mata pencaharian yang dilakukan oleh pekerja informal, maupun pekerja lepas harian.<sup>81</sup>

<sup>80</sup>Syafiudin, “Covid-19 Kerentanan Sosial dan Gagalnya Physical Distancing”, dalam <https://kolom.tempo.co/read/1326074/covid-19-kerentanan-sosial-dan-gagalnya-physical-distancing>, pada 31 Maret 2020.

<sup>81</sup>Rio Sandi Pradana, “Dilema Physical Distancing, Driver Ojol Ingin Dapur Tetap Ngebul”, dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200324/98/1217646/dilema-physical-distancing-driver-ojol-ingin-dapur-tetap-ngebul>, pada 24 Maret 2020.

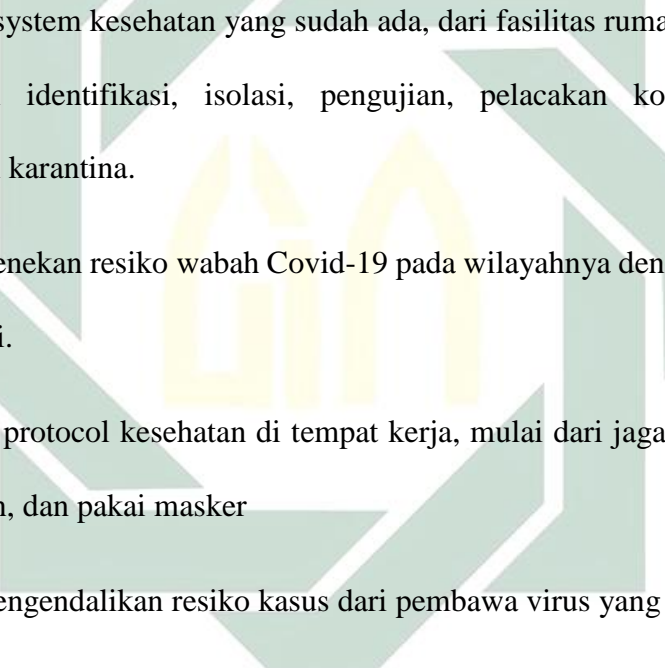
Namun pernyataan hasil penelitian tersebut tidak sepenuhnya benar, dikarenakan bukan soal keterbatasan informasi dan pemahaman mengenai wabah Covid-19, melainkan ketidakmampuan masyarakat kalangan menengah kebawah ini memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mengharuskan mereka untuk bekerja diluar rumah.<sup>83</sup> Dari sini menunjukkan bahwa sedemokratis apapun kebijakan pemerintah akan tetap menuai bias atau pemahaman yang berbeda terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.<sup>84</sup>

<sup>82</sup>D.R.Buana, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona-19 dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, Vol. 7. No.3 (2020), 217-226.

<sup>83</sup>Tim CNN Indonesia, “Pengamat UI: PSBB Pro Kelas Menengah Bukan Kelas Bawah”, dalam <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200415134859-20-493799/pengamat-ui-psbb-pro-kelas-menengah-bukan-kelas-bawah>, pada 15 April 2020.

<sup>84</sup>Rian Nugroho, “Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hal 38.

Karena mau tidak mau pada akhirnya harus hidup berdampingan dengan covid-19, sebagai upaya untuk kembali beraktifitas hidup produktif dan aman dari Covid-19.

- 
- a. Penularan virus di wilayah atau daerah telah bisa dikendalikan.
  - b. Kapasitas system kesehatan yang sudah ada, dari fasilitas rumah sakit mampu melakukan identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga, melakukan karantina.
  - c. Mampu menekan resiko wabah Covid-19 pada wilayahnya dengan kerentanan yang tinggi.
  - d. Penerapan protocol kesehatan di tempat kerja, mulai dari jaga jarak, fasilitas cuci tangan, dan pakai masker
  - e. Mampu mengendalikan resiko kasus dari pembawa virus yang masuk kesuatu wilayah.
  - f. Memberikan kesempatan untuk memberi masukan, berpendapat, dan dilibatkan dalam proses masa menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19.

dijelaskan bagaimana cara memetakan berdasarkan  
setiap daerah, sehingga dapat dibagi menjadi tiga k  
u dengan kondisi daerah yang epidemiologisnya me  
ing dengan kondisi daerah yang epidemiologisny  
ah dengan kondisi daerah yang epidemiologisnya  
ian di poin kedua dijelaskan bagaimana memeta  
penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi C  
kemampuan daerah dengan terpenuhinya indikat  
ya pelindung pada komunitas di masyarakat, keters

u dengan kondisi daerah yang epidemiologisnya me  
ing dengan kondisi daerah yang epidemiologisny  
ah dengan kondisi daerah yang epidemiologisnya  
ian di poin kedua dijelaskan bagaimana memeta  
penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi C  
kemampuan daerah dengan terpenuhinya indikat  
ya pelindung pada komunitas di masyarakat, keters

- ah dengan kondisi daerah yang epide

ian di poin kedua dijelaskan bagaimana memeta  
penanganan kesehatan masyarakat terinfeksi C  
kemampuan daerah dengan terpenuhinya indikat  
ya pelindung pada komunitas di masyarakat, keterso

- dengan respon yang tinggi
- dengan respon yang sedang
- dengan respon yang rendah

memiliki kontak dekat dengan orang yang terindikasi Covid-19, informasi orang yang terinfeksi, pengujian test terhadap orang yang mempunyai kontak dengan orang yang terinfeksi Covid-19, dan penerapan monitoring physical distancing. Dari indicator tersebut pemerintah daerah dipetakan menjadi tiga daerah dengan respon tinggi, sedang, dan rendah.

Dari ketiga point penjelasan pemetaan daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat mewujudkan masyarakat produktif dan aman terhadap Covid-19 dilakukan berdasarkan kondisi epidemiologisnya di tingkat zona aman yaitu zona hijau, kuning, dan merah, dengan kemampuan daerah masing-masing yang mempunyai tingkat respon yang berbeda-beda. Oleh sebab itu pemerintah daerah disetiap 14 hari sekali harus melakukan evaluasi epidemiologisnya agar dapat menerapkan masyarakat produktif dan

n respon tinggi, sedang, dan rendah.

etiga point penjelasan pemetaan daerah tersebut

masyarakat produktif dan aman terhadap Covid-19

arkan kondisi epidemiologisnya di tingkat zona a

kemampuan daerah masing-masing yang mempuny

sebab itu pemerintah daerah disetiap 14 hari sekali l

mologiisnya agar dapat menerapkan masyarakat pro

Selain itu pada Bab III pemerintah daerah juga harus mempersiapkan  
nya untuk pelayanan masyarakat produktif dan aman Covid-19. Pelayanan  
ut meliputi 6 point, yaitu:

Pertama, kesiapan kapasitas layanan kesehatan yaitu ketersediaan fasilitas  
nan yang cukup seperti menyediakan tempat isolasi bagi OTG, ODP, PDP

*Kedua*, kesiapan pemerintah dalam hal memudahkan pelayanan bagi masyarakat dengan cara daring atau online atau bahkan pelayanan keliling kepada masyarakat dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Jadi pemerintah daerah menyediakan pelayanan kepada masyarakat dengan cara daring atau online, sehingga masyarakat tidak harus keluar dari wilayah desa atau kelurahannya.

*Kempat*, kesiapann pembangunan jejaring masyarakat berbasis desa/kelurahan yaitu dalam rangka mendorong masyarakat untuk tetap aman dan produktif. Pemerintah desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat harus mengambil langkah di tingkat RW dengan; membentuk satgas siaga Covid-19 tingkat RW, Sosialisasi hidup bersih dan sehat, sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, mengaktifkan sisitem keamanan warga, membuat system informasi



*Kelima*, kesiapan dunia usaha dalam rencana relaksasi PSBB yaitu kerja samanya pemerintah bersama dengan pemerintah daerah untuk; mendorong usaha yang awalnya offline menjadi online, mendorong usaha mikro untuk dapat mengakses sumber bahan baku lokal dengan harga terjangkau, mendorong gerakan membeli produk nasional, penyerapan produk UMKM, BUMN, BUMD. Swasta, ASN maupun donator. Dukungan terhadap para pelaku sector pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penerapan protokol kesehatan, pemberdayaan dan dukungan UMKM yang berbasis IT dan e-commerce. Peluang bisnis bagi jasa pengantar barang.

- Protokol layanan kesehatan
- Protokol kegiatan diluar rumah
- Protokol pada tempat kerja
- Protokol layanan pendiidikan dan sekolah









pesta pernikahan dengan menerapkan protocol kesehatan. Sehingga menciptakan keamanan kepada tamu yang datang, misalnya; acara yang biasanya berdurasi 2 jam menjadi 4 jam dengan system persesi berdasarkan jumlah, kemudian untuk tamu undangan wajib hadir dengan menggunakan masker, kecuali saat makan. Demikian juga pada saat masuk pintu tempat resepsi untuk melewati detector dan cek suhu tubuh terlebih dahulu. Dan apabila tamu tidak berhasil melewati pengecekan tersebut, makan akan diarahkan ke pintu keluar yang sudah disediakan bilik kesehatan dari tenaga medis, dan ambulan. Namun ketika berhasil melewati pengecekan, maka akan diarahkan untuk mencuci tangan dan masuk ruangan acara.

Pada Selasa 7 Juli 2020 di Jakarta Pusat, Ketua Umum Himpunan Perusahaan Penata Acara Pernikahan (HASTANA) Gandi Priapratama mengatakan “kami mewakili bidang masing-masing, membuat rumusan protocol acara pernikahan di

AMI), Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia (HARPI MEL), Ikatan Ahli Tata Rias Pengantin Indonesia (HARPI MEL), Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesai (HIPDI), Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesai (HIPDI), Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesai (HIPDI), Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PEDI), Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PEDI), Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PEDI) Indonesia sendiri.

asil simulasi itu adalah bahwa pengisian 50% an cara masuk seperti; cuci tangan, cek suhu tubu dua opsi manual dan digital, setelah itu menggunakan emisal dengan sensor menyodorkan tangan. Kem dua opsi manual dan digital, dan menuju ruangan beri salam hormat atau Namaste, terutama di pan berundak agar tetap berjarak dalam bersalaman.

hasil simulasi itu adalah bahwa pengisian 50%  
an cara masuk seperti; cuci tangan, cek suhu tubuh  
dua opsi manual dan digital, setelah itu menggunakan  
emisal dengan sensor menyodorkan tangan. Kemudian  
dua opsi manual dan digital, dan menuju ruangan  
nberi salam hormat atau Namaste, terutama di pan  
berundak agar tetap berjarak dalam bersalaman.

tnya tamu diarah untuk duduk berjarak atau kalau  
ak menyentuh property dekor, dan diharapkan tid  
emi mengoptimalkan waktu berada di dalam ruar







Dengan adanya prosedur yang ketat, acara seperti walimah pernikahan yang dapat mengumpulnya orang banyak, agar tidak boleh dilakukan melebihi kapasitas protocol kesehatan. Jadi pada era new normal ini kegiatan yang melibatkan banyak orang itu tetap dilarang dan penyelenggaraannya tetap harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

- a. Membatasi jumlah tamu dengan hanya 20% dari kapasitas ruangan
- b. Wajib cek suhu bagi tamu dan semua orang yang terlibat dalam acara
- c. Menyediakan tempat pencuci tangan atau hand sanitizer
- d. Panitia atau kru, penghulu, dan perias wajib pakai masker serta face shield, dan, sarung tangan.
- e. Tidak ada salam-salaman atau dengan Salam Namaste yaitu mengatupkan kedua tangan didepan dada.
- f. Tamu bisa hadir secara virtual melalui layar LED, LAPTOP dan sebagainya.

<sup>90</sup>Andhina Effendi, “8 Aturan Ketat Saat Gelar Resepsi Pernikahan Di Era New Normal” dalam <https://www.popbela.com/relationship/married/andhina-effendiaturan-saat-gelar-resepsi-pernikahan-era-new-normal/8>, di akses pada 11 Juni 2020.



tri dalam negeri Tito Karnavian. Namun untuk melaksanakan hal tersebut s berdasarkan izin pemerintah dengan syarat dalam acara tersebut pakai atauran protocol kesehatan dan dipantau oleh kementerian agama t pada daerah tersebut sudah memberlakukan kenormala baru sesuai deng ada dalam syarat yang tertuang dalam kepmendagri No. 440-830 tahun

**ANALISIS *SADDU ADH-DHARĪ'AH* TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMERINTAH TENTANG ATURAN MENGHADIRI UNDANGAN  
WALĪMAH PERNIKAHAN DI MASA PANDEMI COVID-19**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa di setiap Negara sedang mengalami krisis kesehatan dengan hadirnya virus Covid-19 yang sampai sekarang masih tetap ada. Virus ini bermula dari kota Wuhan China, dimana dalam kaitan penyebarannya bermula dari manusia ke manusia lewat kontak fisik yang masuk kedalam tubuh manusia hingga menyebar diberbagai daerah hingga diberbagai Negara, karena penyebarannya sangat cepat sehingga Dunia masuk dalam kondisi darurat virus Covid-19 atau dalam masa pandemi Covid-19.

Tidak hanya itu akibat yang diderita bagi yang positif virus Covid-19 ini bisa sampai kepada tingkat kematian. Sudah banyak kasus yang terdiagnosa akibat kasus virus ini, berdasarkan dari segi kesehatan fisik maupun mental, virus ini lebih mudah menular pada manusia dengan tingkat umur dewasa atau diusia tua dari pada

Adapun cara untuk menghindari dan mencegah dari virus Covid-19 adalah dengan menerapkan hidup bersih seperti cuci tangan, menjaga jarak fisik terhadap orang yang sudah memiliki gejala gejala. Bagi yang memiliki gejala untuk menutup mulut atau hidungnya ketika bersin atau batuk dengan siku dalam atau dengan tisu, dan mencegah wajah agar terhindar dari sentuhan tangan atau permukaan lainnya. Kemudian memakai masker sesuai kriteria kesehatan dan cek suhu sebelum berinteraksi dengan orang lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus Covid-19.

yang sudah memiliki gejala gejala. Bagi yang memiliki gejala untuk me  
t atau hidungnya ketika bersin atau batuk dengan siku dalam atau  
n tisu, dan mencegah wajah agar terhindar dari setuhan tangan ata  
ya. Kemudian memakai masker sesuai kriteria kesehatan dan cek suhu s  
a mencegah kepada mereka yang terindikasi memiliki virus Covid-19.

Dengan melihat kejadian yang dialami oleh Dunia sekarang  
abkan adanya kemafsadatan atau kerusakan terkait adanya Covid-19  
n dasar hukum *Saddu Adh-Dharī'ah* hal seperti ini terutama yang meng

Dengan melihat kejadian yang dialami oleh Dunia sekarang ini, maka dapat dikatakan bahwa adanya kemafsadatan atau kerusakan terkait adanya Covid-19 ini sangat bertentangan dengan dasar hukum *Saddu Adh-Dharī'ah* hal seperti ini terutama yang mengancam keselamatan atau gangguan pada manusia untuk menutup segala aktivitasnya diperbolehkan untuk tidak dilakukan karena mengarahkan kepada kemafsadatan atau kerusakan.

Sehingga dalam hal ini sesuatu yang tadinya diperbolehkan untuk berkumpul atau bertemu langsung secara (muwajahah) agar menjaga jarak fisik

Sehingga dalam hal ini sesuatu yang tadinya diperbolehkan berkumpul atau bertemu langsung secara (muwajahah) agar menjaga jarak fisik.

Jadi, penulis memahami bahwa dalam kaidah ushul *Saddu Adh-Dhari'ah*askan bahwa Islam membangun dengan dasar mencari maslahat dan hindarkan mudharat. Dan untuk tetap mendapatkan maslahah dan terhindar dari mudharat berdasarkan perantara *wasilah* atau pertemuan yang ditakutkan akan menimbulkan mudharat. Sehingga untuk menghindari penyebaran virus Covid-19, maka untuk sementara dihindari hal-hal yang membuat penyebaran virus Covid-19.

Aturan menghadiri walimah pernikahan sebenarnya tidak dijelaskan secara jelas ayat maupun redaksinya, namun secara implisit aturan tersebut terdapat dalam keseluruhan aturan dalam kegiatan yang terindikasi adanya perkumpulan atau pertemuan antara dua orang atau lebih dengan tidak memperhatikan protokol kesehatan, sehingga dalam hal ini penulis memakai istilah aturan berkumpul. Aturan berkumpul ini setidaknya diatur dalam beberapa kebijakan pemerintah,

Namun terkait menghadiri walimah pernikahan ini telah diatur dalam kebijakan new normal, meskipun tidak menjamin akan terhindar dari adanya Covid-19. Kebijakan tersebut diantaranya:

1. Kebijakan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik dengan diikuti belajar dan bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah.
2. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
3. Kepmendagri No. 440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

Kebijakan tersebut yang memuat aturan aturan berkumpul merupakan bentuk ikhtiar pemerintah yang patut diapresiasi dan dipatuhi sebagai wujud usaha pemerintah dalam melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat dalam hal kesehatan dan kebutuhan ekonomi Negara. Dan ini merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya aturan aturan berkumpul tersebut akan membuat keadaan bertambah buruk.

Tanpa adanya protokol kesehatan seperti pemakaian masker dan jaga jarak fisik, akan menambah kasus positif terhadap orang yang rentan terhadap penyakit yang didapatkannya dari luar dirinya. Tidak hanya itu, jika aturan aturan berkumpul ini tidak dilakukan bersamaan dengan usaha saling menjaga dan saling mengingatkan satu sama lain, maka akan berdampak pada ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kesadaran untuk bekerjasama antara seluruh elemen masyarakat adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam mewujudkan tatanan hidup baru yang aman dan tetap produktif.

atau kasus positif Covid-19 yang diperoleh disuatu daerah tersebut se  
banyak. dan atau

Kemampuan pemerintah daerah yang rendah responnya terhadap in  
terkait penanganan Covid-19, dan atau

Rendahnya respon pemerintah terhadap pemetaan daerah wilayahnya d  
penelusuran adanya ODP, PDP, atau Positif Covid-19.

Dengan indikator-indikator tersebut, pemerintah daerah yang masih  
gori zona merah dengan respon rendah atau masih ada dari salah satu in  
ebut, maka pemerintah daerah tersebut dilarang memberlakukan t  
mal baru dan produktif, karena belum aman terhadap Covid-19. Sel  
um pedoman aturan normal baru tersebut tidak dapat diterapkan di

- perintah daerah yang rendah responnya terhadap penanganan Covid-19, dan atau respon pemerintah terhadap pemetaan daerah wilayah adanya ODP, PDP, atau Positif Covid-19.
- indikator-indikator tersebut, pemerintah daerah yang merah dengan respon rendah atau masih ada dari saat pemerintah daerah tersebut dilarang member dan produktif, karena belum aman terhadap Covid-19.

pon rendah atau masih  
aerah tersebut dilara  
arena belum aman te  
I baru tersebut tidak

kebijakan masyarakat produktif dan aman  
 antara masyarakat dengan pemerintah daerah  
 serta kondisi epidemiologisnya ditingkat zona  
 penguatan pemerintah daerah minimal masing-

Begitu juga dengan menghadiri resepsi atau walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19 ini, dimana dalam kegiatan acara walimah tersebut mengundang banyak orang dengan indikasi adanya kerumunan. Kegiatan seperti ini tentunya dilarang oleh pemerintah karena bertolak belakang dengan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan hadirnya pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19. Menghadiri walimah pernikahan dapat dilaksanakan dengan syarat daerah atau wilayah tersebut sudah memenuhi tiga indikator yang terdapat dalam Bab II pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19.

kecuali saat makan.

Melewati detector dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk

Apabila tamu dalam pengecekan tidak berhasil maka diarahkan ke

keluar yang sudah disediakan bilik kesehatan dari tenaga medis, dan am

Dan ketika berhasil, selanjutnya tamu mencuci tangan yang sudah disiap

Dekorasi ruangan acara didesign system sesi bergantian untuk mer

kerumunan tamu.

Bahan material dekorasi juga menghindari adanya bahan kain dan bunga

yang dinilai membawa virus dengan mengganti fresh flower.

Kemudian jumlah tempat duduk disesuaikan dengan kapasitas jara

- kecuali saat makan.
- Melewati detector dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk
- Apabila tamu dalam pengecekan tidak berhasil maka diarahkan ke
- keluar yang sudah disediakan bilik kesehatan dari tenaga medis, dan am
- Dan ketika berhasil, selanjutnya tamu mencuci tangan yang sudah disiap
- Dekorasi ruangan acara didesign system sesi bergantian untuk mer
- kerumunan tamu.
- Bahan material dekorasi juga menghindari adanya bahan kain dan bunga
- yang dinilai membawa virus dengan mengganti fresh flower.
- Kemudian jumlah tempat duduk disesuaikan dengan kapasitas jara

kecuali saat makan.

Melewati detector dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk

Apabila tamu dalam pengecekan tidak berhasil maka diarahkan ke

keluar yang sudah disediakan bilik kesehatan dari tenaga medis, dan am

Dan ketika berhasil, selanjutnya tamu mencuci tangan yang sudah disiap

Dekorasi ruangan acara didesign system sesi bergantian untuk mer

kerumunan tamu.

Bahan material dekorasi juga menghindari adanya bahan kain dan bunga

yang dinilai membawa virus dengan mengganti fresh flower.

Kemudian jumlah tempat duduk disesuaikan dengan kapasitas jara

kecuali saat makan.

Melewati detector dan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk

Apabila tamu dalam pengecekan tidak berhasil maka diarahkan ke

keluar yang sudah disediakan bilik kesehatan dari tenaga medis, dan am

Dan ketika berhasil, selanjutnya tamu mencuci tangan yang sudah disiap

Dekorasi ruangan acara didesign system sesi bergantian untuk mer

kerumunan tamu.

Bahan material dekorasi juga menghindari adanya bahan kain dan bunga

yang dinilai membawa virus dengan mengganti fresh flower.

Kemudian jumlah tempat duduk disesuaikan dengan kapasitas jara



Jadi, aturan menghadiri walimah pernikahan pada pedoman tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 berlaku pada daerah yang pada kondisi epidemiologisnya belum aman. Dan meskipun tatanan normal baru mulai diterapkan dengan menghadiri walimah pernikahan tetap harus menggunakan protokol kesehatan.

Kebijakan pemerintah tentang aturan berkumpul ini lebih kepada antisipasi atas adanya Covid-19 serta menghindari dampak dari penyebarannya. Seperti halnya menghadiri acara walimah pernikahan, dimana dalam acara tersebut mengundang banyak orang untuk berkumpul dengan tujuan memberikan do'a restu

73

Dengan kebijakan tentang aturan berkumpul ini, pengaturan menghadiri walimah pernikahan dimaksudkan untuk mengantisipasi atau menanggulangi adanya Covid-19 serta dampak dari penyebarannya. Dalam metode hukum Islam *Saddu Adh-Dhari'ah*, yaitu salah satu metode Islam dalam menetapkan hukum menurut Imam Asy-Syatibi yang dikutip oleh Andrewi dalam kitab ushul fiqih menyatakan bahwa:

Artinya: “Melaksanakan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kemafsadatan”.<sup>94</sup>

<sup>93</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1987), cet ke 7, 186

<sup>95</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansi Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bogor, 2009), 142-143.

ena itu *Saddu Adh-Dharī'ah* lebih kepada mencegah adanya *waṣīl* (jalan) untuk sementara waktu demi terjaganya dari mafsadat berupa Covid-19.

## PENUTUP

Dari pembahasan diatas, penulis menemukan dua kesimpulan yang menjadi jawaban penting dalam pembahasan skripsi ini, kesimpulan itu yaitu:

- 76

keburukan”. Dimana tidak memenuhi undangan walimah pernikahan, lebih diutamakan meskipun dalam kondisi zona aman, karena kebijakan pemerintah tersebut tidak menjamin tidak tertularnya terhadap Covid-19, sehingga berdasarkan metode *Saddu Adh-Dhari’ah*, menghadiri walimah pernikahan adalah sebuah perantara atau *washilah* yang terindikasi dapat tertularnya virus Covid-19.

## B. SARAN

Berkaitan dengan pembahasan mengenai aturan menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan kondisi yang aman terhadap Covid-19, kiranya perlu bagi masyarakat untuk tidak memaksakan hadir dalam memenuhi undangan walimah pernikahan selama masa pandemi Covid-19. Dan lebih memilih melalui via online apabila menyediakan alternative lain untuk memenuhi undangan walimah pernikahan. Dan lebih kepada menghindari hal-hal yang bersifat kerumunan atau tidak pada kebutuhan yang selain bersifat primer.
2. Bagi aparat pemerintah, dalam rangka disiplin protokol kesehatan dan pencegahan atas penularan Covid-19. bahwa kebijakan pemerintah yang memberlakukan prosedur atau aturan design protokol kesehatan dalam menghadiri undangan walimah pernikahan di masa pandemi Covid-19, perlu sekiranya bagi setiap tamu yang diundang untuk mengecek kesehatan diri terlebih dahulu sebagai tanda bukti bahwa sebelum menghadiri



al-Ghaib. Tafsir ar-Razi. Versi 2, 9.

akariya. *Fathul Wahab*. Juz II. Semarang: Toha

Jmm. Juz VII. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

l-Muhazzab. juz II. Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilm

kur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama. 2008.

Muhammad Ali.Az *Zawaajul Islamil Muba*

muzayyanah Djunaedi. Hadiah Untuk Pengantin.

y. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana. 2

dy Bayu. “ Mengenal Apa Itu New normal di

[www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/0631008](http://www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/0631008)

normal-di-tengah-pandemi-corona-, diakses 20

isis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam M

corona-19 dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa”

‘yar’i. Vol. 7. No.3. 2020

Disease Control and Prevention, “How I

[www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html)

- al-Ghaib. Tafsir ar-Razi. Versi 2, 9.
- akariya. *Fathul Wahab*. Juz II. Semarang: Toha
- Jmm. Juz VII. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- l-Muhazzab. juz II. Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilm
- kur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama. 2008.
- Muhammad Ali.Az *Zawaajul Islamil Muba*
- muzayyanah Djunaedi. Hadiah Untuk Pengantin.
- y. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana. 2
- dy Bayu. “ Mengenal Apa Itu New normal di
- [www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/0631008](http://www.kompas.com/tren/read/2020/05/20/0631008)
- normal-di-tengah-pandemi-corona-, diakses 20
- isis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam M
- corona-19 dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa”
- ‘yar’i. Vol. 7. No.3. 2020
- Disease Control and Prevention, “How I
- [www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html](https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html)

- DEPDIKBUD. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media 2005.
- Effendi, Andhina. “8 Aturan Ketat Saat Gelar Resepsi Pernikahan Di Era New Normal” dalam <https://www.popbela.com/relationship/married/andhina-effendi/aturan-saat-gelar-resepsi-pernikahan-era-new-normal/8>. di akses pada 11 Juni 2020
- Elmira, Putu. “Tata Cara Gelar Resepsi Pernikahan dengan Protokol Kesehatan di Era New Normal”, dalam <https://m.liputan6.com/lifestyle/read/4298819/tata-cara-gelar-resepsi-pernikahan-dengan-protokol-kesehatan-di-era-new-normal>, di akses pada 08 Juli 2020.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadīth Rasulullah SAW*. Metro: STAIN
- Eunha Shim et al. “Transmission Potential and Severity of Covid 19 in South Korea”. *International Journal of Infectious Diseases*. Vol 93. No. April 2020.
- Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum. 2018.
- Febriyandi, Febby. “Penanganan Wabah Covid-19 dengan Pendekatan Budaya”, dalam <https://kebudayaan.kemendikbud.go.id/bpnbkepri/penanganan-wabah-covid-19-dengan-pendekatan-budaya/>, diakses pada 2 April 2020.
- Harahap, Nursaniah. “Menghadiri Undangan *Walimatul ‘Urf* Dalam Jumlah Yang Banyak Serta Berjauhan Dalam Satu Waktu Menurut Pendapat Fungsionaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus Masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sel Tuan Kabupaten Deli Serdang)”. Skripsi UIN Sumatera Utara. 2018.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih I*. Jakarta: Logos. 1996.
- Heru, Margianto, “Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifitas Lawan Corona”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/11054741/pembatasan-sosial-berskala-besar-efektifkah-lawan-corona> , pada 1 April 2020.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *A’lam al-Muqi’in*. juz 2. Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyah. 1996.
- Ibnu Majah Sunan Al-Hafiz Abi ‘abdillah bin Yazid Al-Qozwini. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 1. Indonesia: Maktanah Dahlan. 207-275 H







Lee et al. "Interrupting Transmission of Covid 19: Lesson from Containment effort in Singapore". *Journal of Travel Medicine*. Vol. 27. No. 2. Maret. 2020.

Via Al-Qur'an Indonesia <http://quran-id.com>, Al-An'am 108

World Health Organization, “Q&A on coronavirus (Covid-19)”, dalam <https://web.archive.org/web/20200304115037/https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses>, di akses pada 4 Maret 2020.

World Health Organization, *Coronavirus disease (COVID-19) pandemi*, <https://www.who.int?indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, 2020

Yudhi Hertanto, “Inkonsistensi ditengah Pandemi”, dalam <https://rmol.id/read/2020/04/05/428881/inkonsistensi-di-tengah-pandemi>, pada 5 April 2020.

